

PENGARUH UKURAN DEWAN DIREKSI, KOMISARIS INDEPENDEN, KERAGAMAN GENDER, DAN KOMPENSASI EKSEKUTIF TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PERUSAHAAN (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2017-2019)

Bill Hudha, Dwi Cahyo Utomo¹

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

This study aims to obtain empirical evidence on the effect of board size, proportion of independent commissioners, gender diversity and executive compensation on tax avoidance. Corporate tax avoidance is measured using the effective tax rate (ETR). This study uses quantitative research methods using multiple linear regression analysis. The population of this study is all companies engaged in the manufacturing sector listed on the Indonesia Stock Exchange from 2017 to 2020. The sample was selected using a purposive sampling method and obtained 117 companies.

The results of the test show that gender diversity has a significant effect on tax avoidance, while board of directors size, the proportion of independent commissioners and executive compensation do not have a significant effect on tax avoidance.

Keywords: tax avoidance, board of directors size, proportion of independent commissioners, gender diversity and executive compensation

PENDAHULUAN

Pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara yang sifatnya dapat dipaksakan. Pajak menjadi penyumbang terbesar dalam pendapatan negara. Menurut informasi yang diperoleh dari www.kemenkeu.go.id pada tahun 2019 total pendapatan negara adalah sebesar Rp.2.165,1 Triliun, dimana dari total tersebut sebanyak Rp.1.786,4 Triliun di peroleh dari penerimaan pajak, sedangkan penerimaan negara bukan pajak adalah sebesar Rp.378,3 Triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp.0,4 Triliun. Pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak tersebut tentunya akan dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan perekonomian negara yang tujuan akhirnya adalah untuk kesejahteraan rakyat. Pemerintah mengharapkan sikap kepatuhan pajak dari masyarakat dan perusahaan. Dalam hal ini perusahaan menganggap pembayaran pajak dapat mengurangi pendapatan perusahaan. Dimana perusahaan menemukan celah bahwa beban pajak yang dibebankan dapat dimanipulasi dengan melihat kelemahan peraturan dan undang-undang (Winarsih *et al*, 2014). Keberadaan komponen corporate governance seperti dewan direksi dan komisaris independen diperlukan untuk mengawasi perencanaan pajak agar sesuai dengan peraturan yang berlaku (Low, 2006).

Di Indonesia menerapkan sistem two-tier system, di mana direksi dan komisaris akan bersama-sama memberikan arahan kepada manajemen perusahaan untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh pemegang saham. Adanya konflik kepentingan antara agen dan pemegang saham membuat peran pengawasan dari komisaris independen menjadi lebih meningkat dalam mengurangi perilaku penghindaran pajak (Zhou, 2011). Direksi yang menjalankan perusahaan mempunyai peran yang cukup penting dalam penghindaran pajak (Dyrenge *et al*, 2010). Menurut Hoseini *et al* (2018) kehadiran

¹ Corresponding author

wanita di dewan direksi perusahaan dapat meningkatkan kinerja dan pengawasan di dalam perusahaan. Pembayaran kompensasi yang tinggi, akan berimbas kepada pengurangan pembayaran pajak oleh perusahaan (Minnick dan Noga, 2010).

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Penghindaran Pajak

Tindakan penghindaran pajak merupakan salah satu cara yang digunakan oleh perusahaan untuk menekan beban pajak yang diperoleh perusahaan dengan cara melihat kelemahan undang-undang. Karena penghindaran pajak belum ada regulasi yang secara jelas mengaturnya, sehingga penghindaran pajak bersifat legal. Namun disisi lain apabila tindakan penghindaran pajak ini ketahu akan menimbulkan resiko bagi perusahaannya seperti denda ataupun rusaknya nama baik perusahaan. Sehingga penghindaran pajak menjadi suatu hal yang rumit, karena ada dua sisi yang bersebrangan dimana diperbolehkan, namun juga tidak diharapkan (Maharani dan Suardana, 2012).

Penghindaran pajak memiliki kelebihan seperti, membawa keuntungan bagi perusahaan dan manajemen perusahaan memperoleh imbalan atas tindakan penghindaran pajak yang telah dilakukan tersebut. Selain, itu penghindaran juga memiliki kelemahan yaitu, dikenakan denda dikemudian hari dan reputasi perusahaan akan buruk, sehingga akan berdampak terhadap turunnya harga saham perusahaan (Hidayanti, 2013).

Dewan Direksi

Dalam sebuah perusahaan adanya direksi yang mengatur operasional perusahaan. Direksi juga dapat berfungsi sebagai penanggung jawab terhadap segala hal yang menyangkut seluruh aktivitas perusahaan. Tugas direksi harus memaksimalkan kepentingan pemegang saham dengan cara menjalankan tugas mereka sebaik mungkin. Keterbukaan informasi mengenai seluruh apa yang menyangkut perusahaan harus dilaporkan kepada pemilik agar tidak adanya kesalah pahaman antara agen dan pemilik. Eisenhardt (1989) dalam Lukviarman (2016) menyatakan bahwa jajaran direksi merupakan mekanisme penting di dalam membatasi kegiatan manajer, pada saat manajer mempunyai tujuan yang berbeda dengan pemilik perusahaan. Namun demikian keberadaan direksi tidak selalu melindungi kepentingan pemegang saham.

Komisaris Independen

Keberadaan komisaris independen diharapkan mampu meningkatkan kinerja manajemen perusahaan. Menurut Armstrong (2015) mengungkapkan bahwa kehadiran komisaris independen sangat diperlukan di dalam suatu perusahaan, karena memiliki pertanggung jawaban kepada pemegang saham dan juga masyarakat pada umumnya. Komisaris independen merupakan tangan kanan tau kepercayaan dari pemegang saham apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh pemilik. Diharapkan adanya transparansi dalam menjalankan perusahaan dan meningkatkan pengawasan terhadap kinerja manajemen perusahaan.

Keragaman Gender

Kehadiran wanita di dalam dewan direksi merupakan hal yang penting karena memiliki peran yang efektif dalam memantau kinerja manajerial. Direksi wanita cenderung untuk melakukan yang terbaik dalam perusahaan, sehingga dapat menyeimbangkan perilaku yang bertanggung jawab terhadap perusahaan, pemegang saham, dan masyarakat. Hoseini *et al* (2018) berpendapat bahwa direksi wanita lebih rasional dalam membuat keputusan dan transparansi laporan keuangan dibandingkan dengan laki-laki.

Kompensasi Eksekutif

Kompensasi eksekutif adalah imblan yang diterima eksekutif dalam sebuah perusahaan, dapat berupa gaji, bonus, tunjangan dan juga opsi saham. Kompensasi eksekutif dapat membantu menyelaraskan kepentingan agen dan juga pemegang saham. Kompensasi eksekutif dapat digunakan sebagai alat untuk menangani masalah keagenan yaitu meluruskan tujuan antara manajemen dan pemegang saham (Desai dan Dharmapala, 2006).

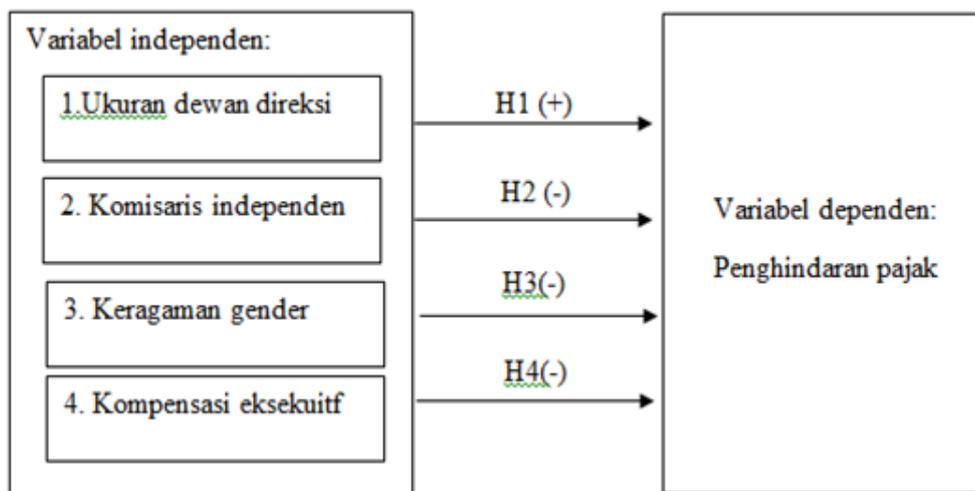
Teori Agensi

Teori ini akan memberikan penjelasan mengenai perebedaan kepentingan yang terjadi antara agen dan pemilik atau pemegang saham. Jensen dan Meckling (1976) mengemukakan bahwa konflik kepentingan timbul ketika pemilik memberikan wewenang terhadap agen untuk mengatur dan menjalankan perusahaan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemilik. Dalam hal ini, agen tidak selalu menuruti keinginan dari pemegang saham. Penghindaran pajak dapat membuka kesempatan bagi agen untuk memperoleh keuntungan jangka pendek, sedangkan pemilik mengharapkan keuntungan jangka panjang demi kelangsungan perusahaan (Minnick dan Noga, 2010).

Dalam hal ini terdapat *conflict of interest* antara pemegang saham dengan agen, dimana pemilik akan terganggu karena agen lebih mengutamakan kepentingannya sendiri dengan cara memanipulasi laba perusahaan yang mana tindakan tersebut tidak diketahui oleh pemilik, sehingga ini menjelaskan bahwa agen tidak selalu menuruti apa yang diinginkan oleh pemegang saham. Dari perbedaan kepentingan tersebut, adanya upaya dari pemegang saham untuk mengeluarkan biaya agensi (Jensen dan Meckling, 1976).

Penelitian ini menguji apakah ukuran dewan direksi, komisaris independen, keragaman gender, kompensasi eksekutif memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap Penghindaran Pajak

Menurut teori keagenan agen selalu memiliki kepentingan yang berbeda dengan pemilik. Jumlah direksi yang kecil memungkinkan perusahaan menghasilkan kinerja yang lebih baik, dan sebaliknya proporsi dewan yang besar akan berakibat buruk terhadap kinerja perusahaan (Halioui, 2016). Penelitian sebelumnya Armstrong *et al* (2015)

berpendapat bahwa antara penghindaran pajak dan direksi memiliki pengaruh yang positif, dimana dewan direksi memanfaatkan pengetahuan yang mereka miliki mengenai perusahaan.

Minnick dan Noga (2010) menyatakan bahwa semakin sedikit jumlah direksi dalam perusahaan, akan menyebabkan meningkatnya kemungkinan penghindaran pajak. Sehingga secara tidak langsung jumlah direksi dalam perusahaan dapat menentukan tingkat penghindaran pajak itu sendiri. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesisnya adalah:

H1 : Ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

Pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak

Dalam perusahaan komisaris independen mempunyai peran tersendiri, karena bebas dari kepentingan apapun dan sangat penting keberadaannya. Menurut Desai dan Dharmapala (2006) menjelaskan bahwa komisaris independen merupakan wakil dari pemilik perusahaan dimana bertugas untuk mengawasi perusahaan dan memantau kinerja yang dilakukan oleh manajemen perusahaan.

Menurut Zhou (2011) menjelaskan bahwa keberadaan komisaris independen di dalam sebuah perusahaan memiliki dampak yang baik, salah satunya adalah berdampak terhadap pengurangan perilaku agresivitas pajak. Hal ini karena adanya tuntutan teori agensi, dimana tugas utama dari komisaris independen adalah untuk menjaga kelangsungan perusahaan yang mana akan berdampak baik terhadap pemilik dan stakeholder lainnya. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesisnya adalah:

H2: Proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

Pengaruh Keragaman Gender terhadap Penghindaran Pajak

Dewan direktur memainkan peran utama, yaitu sebagai pelaksana dan bertanggung jawab terhadap kegiatan operasional perusahaan, kehadiran perempuan di dewan direksi diklaim untuk mempromosikan dua fungsi tersebut. Penelitian oleh Richardson (2011) dan Adamz dan Ferreira (2009) mengemukakan bahwa kehadiran wanita di dewan perusahaan, dapat mengurangi perilaku oportunistik agen yaitu penghindaran pajak, ini disebabkan karena pengawasan yang lebih baik terhadap kinerja keuangan. Karena sifat dan karakter dari wanita itu sendiri yang cenderung menghindari resiko dan berperilaku rasional dibandingkan dengan laki-laki.

Menurut Francis *et al* (2014) yang mana meneliti pengaruh keragaman gender terhadap agresivitas pajak, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa direksi wanita tidak memiliki pengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak di perusahaan yang disebabkan karena perilaku untuk menghindari resiko. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesisnya adalah:

H3: Keragaman gender berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

Pengaruh kompensasi Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak

Teori agensi menjelaskan bahwa untuk meluruskan konflik yang terjadi antara agen dan pemegang saham adalah dengan memberikan kompensasi yang diinginkan oleh manajemen, agar dapat memotivasi agen untuk dapat bertindak selaras dengan kepentingan pemegang saham. Untuk itu pemegang saham mencoba untuk memberikan imbalan kepada eksekutif perusahaan untuk mengoptimalkan kepentingan pemegang saham (Minnick dan Noga, 2010).

Penelitian dari Desai dan Dharmapala (2006) menjelaskan bahwa pemberian kompensasi yang besar dapat mengurangi penghindaran pajak perusahaan, hal ini disebabkan karena tujuan utama agen adalah kompensasi yang besar, sehingga mereka tidak perlu melakukan penghindaran pajak yang mana akan menimbulkan masalah dikemudian hari. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesisnya adalah:

H4: Kompensasi eksekutif berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak dengan menggunakan proksi ETR. Penghindaran pajak dihitung dengan membandingkan beban pajak penghasilan dibagi dengan dengan pendapatan sebelum pajak (Minnick dan Noga, 2010). Sementara untuk variabel independen yaitu ukuran dewan direksi, proporsi komisaris independen, keragaman gender, dan kompensasi eksekutif. Ukuran dewan direksi adalah jumlah total dewan direksi yang ada dalam satu perusahaan (Halioui, 2016). Komisaris independen merupakan pihak yang tidak terafiliasi di dalam perusahaan. Proporsi komisaris independen merupakan perbandingan antara komisaris independen dibagi dengan jumlah dewan komisaris (Armstrong, 2015). Keragaman gender didapat dari perbandingan antara direksi wanita dibagi dengan jumlah direksi (Adam dan Ferreira, 2009). Kompensasi eksekutif adalah jumlah kompensasi yang didapat selama satu tahun oleh komisaris dan direksi. Kompensasi eksekutif diukur dengan menggunakan logaritma natural yang didalamnya mencakup gaji, bonus, maupun tunjangan yang diterima direksi dan komisaris (Halioui, 2016).

Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019. Alasan memilih perusahaan manufaktur adalah karena jumlahnya yang banyak dibandingkan dengan industry yang lain, sehingga dapat menggambarkan keadaan yang ada di Indonesia. Metode pemilihan sampel adalah dengan menggunakan metode purposive sampling, yaitu pemilihan sampel dengan menggunakan kriteria tertentu. Berikut kriteria dalam pemilihan sampel:

1. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan untuk periode 2017-2019.
2. Data yang lengkap untuk variabel penelitian.
3. Mempunyai laba sebelum pajak positif. Untuk memudahkan dalam mencari nilai *ETR*.
4. Menggunakan mata uang rupiah . agra memudahkan dalam mengelompokan dan menganalisis data.

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan analisis multivariate dengan menggunakan regresi berganda untuk pengujian hipotesis sebagai berikut:

$$ETR = \alpha_0 + \beta_1 \text{DIREKSI} - \beta_2 \text{PDKI} - \beta_3 \text{PDW} - \beta_4 \text{LnREMUN} + \varepsilon$$

ETR : penghindaran pajak yang diukur dengan membandingkan total beban pajak dengan pendapatan sebelum pajak.
DIREKSI : jumlah total dewan direksi.

- PDKI : komisaris independen, membandingkan komisaris independen dengan jumlah anggota dewan komisaris.
- PDW : keragaman gender diukur dengan membandingkan direksi wanita dengan jumlah anggota dewan direksi.
- LnREMUN : logaritma natural total kompensasi direksi dan komisaris.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Berdasarkan kriteria pengambilan sampel diperoleh data penelitian sebanyak 504 data pengamatan. Dengan menerapkan metode purposive sampling diperoleh sebanyak 117 sampel penelitian selama 3 tahun pengamatan. Berikut tabel 1 akan menyajikan ringkasan mengenai sampel dari penelitian:

Tabel 1
Kriteria Pemilihan Sampel

KRITERIA	TAHUN			TOTAL
	2017	2018	2019	
Perusahaan manufaktur terdaftar di BEI per 8 juli 2020	168	168	168	504
Laporan keuangan tidak tersedia	27	27	27	(81)
Memiliki laba sebelum pajak negatif	35	29	23	(87)
Data tidak lengkap untuk variabel	51	47	43	(141)
Tidak menggunakan mata uang rupiah	25	25	25	(75)
Jumlah				120
Outlier				(3)
Total				117

Sumber: Data sekunder yang telah diolah, 2020

Analisis data

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk mendaptka gambaran tau deskripsi dari data masing-masing variabel dalam penelitian ini. Gambaran atau deskripsi dari data penelitian ini dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum, dan minimum. Hasil statistik deskriptif setiap variabel ditunjukkan pada tabel 2.

Tabel 2
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ETR	117	.0124	.4028	.260368	.0568384
DIREKSI	117	2	12	5.50	2.242
PDKI	117	.2000	.8000	.418761	.1147943
PDW	117	.0000	.6667	.113478	.1622158
LnREMUN	117	21.3870	27.5995	23.809528	1.4344784
Valid N (listwise)	117				

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2020

Pembahasan Hasil Penelitian

Tabel 3 menunjukkan hasil regresi dari model penelitian. Variabel ukuran dewan direksi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis pertama yang menyatakan bahwa ukuran dewan direksi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Variabel proporsi komisaris independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis kedua yaitu proporsi komisaris independen memiliki pengaruh yang negatif terhadap penghindaran pajak. Variabel keragaman gender memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil ini sesuai dengan hipotesis ketiga dimana keragaman gender memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Variabel kompensasi eksekutif tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis keempat yaitu kompensasi eksekutif memiliki pengaruh yang negative terhadap penghindaran pajak.

Tabel 3
Hasil Uji Hipotesis

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.342	.105		3.253	.002
DIREKSI	.005	.003	.186	1.484	.141
PDKI	.084	.052	.170	1.624	.107
PDW	-.122	.038	-.349	-3.232	.002
LnREMUN	-.005	.005	-.137	-1.101	.273

Sumber: data sekunder yang diolah, 2020

Pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap Penghindaran Pajak

Hasil uji t pada tabel 3 menunjukkan jika ukuran dewan direksi mempunyai nilai signifikansi sebesar 0.141. Dimana nilai signifikansi lebih besar dari 0.05. yang berarti dewan direksi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil ini tidak sesuai dengan teori yang diambil yaitu teori agensi. Hal ini ini tidak membuktikan bahwa semakin banyak dewan direksi dalam perusahaan , semakin banyak penghindaran

pajak yang dilakukan. hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Armstrong *et al* (2015). Hasil penelitian ini tidak signifikan, karena dari 40 sampel perusahaan sebanyak 17 perusahaan atau sebesar 42.5% memiliki direksi independen di dalam perusahaan dimana akan menyebabkan perilaku yang pasif terhadap penghindaran pajak. Menurut Lanis dan Richardson (2011) direktur yang berasal dari luar tidak mungkin berkolusi dengan manajer, sebaliknya mereka cenderung memantau dan menjaga kekayaan pemegang saham.

Pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak

Hasil uji t menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen memiliki signifikansi sebesar 0.107. Dimana nilai signifikansi lebih besar dari 0.05. yang mana komisaris independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil ini tidak membuktikan bahwa semakin banyak komisaris independen di perusahaan, akan menurunkan tindakan penghindaran pajak. Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian oleh Halioui (2016). Kehadiran komisaris independen dalam perusahaan tidak selalu membawa perubahan kearah yang lebih baik bagi perusahaan terutama dalam hal perpajakan, kehadiran komisaris independen mungkin dapat berdampak lebih buruk bagi perusahaan (Solomon, 2007). Menurut Meilinda (2013), bisa saja dengan adanya komisaris independen di dalam perusahaan hanya digunakan sebagai ketentuan formal perusahaan saja dan untuk mematuhi peraturan yang ada.

Pengaruh Keragaman Gender terhadap Penghindaran Pajak

Hasil uji t menunjukkan bahwa keragaman gender memiliki nilai signifikansi sebesar 0.002 dimana lebih kecil dari 0.05 dan memiliki arah yang negatif. Dimana keragaman gender memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil ini membuktikan bahwa semakin banyaknya direksi wanita, maka mengurangi penghindaran pajak di perusahaan. Ini juga menunjukkan bahwa direksi wanita mampu mempengaruhi dan memberikan keputusan perpajakan. Dengan adanya wanita di eksekutif perusahaan diharapkan mampu memberikan pandangan yang luas dan berusaha menghindari resiko dalam pengambilan keputusan. Hasil ini sesuai dengan penelitian dari Lanis dan Richardson (2011) serta Adam dan Ferriera (2009).

Pengaruh Kompensasi Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak

Hasil uji t menunjukkan bahwa kompensasi eksekutif mempunyai signifikansi sebesar 0.273. dimana lebih besar dari 0.05. ini mengartikan bahwa kompensasi eksekutif tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Teori agensi yang menjelaskan bahwa pemberian kompensasi dapat menyelaraskan tujuan agen dan pemegang saham dalam penelitian ini tidak terbukti. Pemberian kompensasi yang tinggi tidak terbukti dapat mengurangi penghindaran pajak. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Desai dan Dharmapala (2006). Agen lebih menyukai pemberian kompensasi berupa opsi saham, karena lebih bersifat jangka panjang, sehingga dapat lebih memotivasi agen untuk menyelaraskan tujuannya dengan pemegang saham yang sesuai dengan penelitian Minnick dan Noga (2010).

KESIMPULAN

Penelitian ini menguji apakah ukuran dewan direksi, komisaris independen, keragaman gender, dan kompensasi eksekutif memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Ukuran dewan direksi, proporsi komisaris independen, dan kompensasi eksekutif tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan keragaman gender mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini tidak membuktikan bahwa direksi yang semakin banyak akan

meningkatkan penghindaran pajak. Komisaris independen yang semakin banyak tidak terbukti dapat mengurangi penghindaran pajak dan tidak dapat membendung perilaku oportunistik dari manajer. Keragaman gender memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak, dimana keberadaan dewan direksi wanita mampu untuk mengurangi penghindaran pajak di dalam perusahaan. Pemberian kompensasi yang tinggi tidak terbukti dapat mengurangi penghindaran pajak di dalam perusahaan.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sampel yang digunakan masih sedikit, karena rentang periode yang hanya meneliti perusahaan manufaktur periode 2017-2019. Pengukuran variabel penghindaran pajak yang masih kurang luas. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah variabel independen yang terkait dengan penelitian ini.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah sektor perusahaan yang ada tidak hanya perusahaan manufaktur, sehingga hasil penelitian dapat menjelaskan fenomena secara keseluruhan dan juga mengeksplor variabel yang terkait dengan penelitian ini.

REFERENSI

- Adams, R. B., & Ferreira, D. (2009). 'Women in the boardroom and their impact on governance and performance'. *Journal of financial economics*, Vol. 94 No.2, pp 291-309.
- Armstrong, C. S., Blouin J. L., Jagonlizer, a. D., & Larcker, D. F. (2015) 'Corporate Governance, Incentives, and Tax Avoidance', *Journal of Accounting*, Vol.2 No.3, pp. 179-234.
- Desai, M. & Dharmapala, D (2006) 'Corporate Tax Avoidance and High-Powered Incentives'. *Journal of Financial Economics*, 79(1), pp.145-179.
- Dyreng, Scott D., Michelle Hanlon, Edward L. Maydew (2010) 'The Effect of Executives on Corporate Tax Avoidance', *The Accounting Review*, 85, pp. 1163-1189.
- Francis, B. B., Hasan, I., Wu, Q., & Yan, M. (2014). 'Are female CFOs less tax aggressive? Evidence from tax aggressiveness'. *The Journal of the American Taxation Association*, Vol.36 No.2, pp 171-202.
- Halioui, K., Neifar, S., & Ben Abdelaziz, F. (2016). 'Corporate governance, CEO compensation and tax aggressiveness: Evidence from American firms listed on the NASDAQ 100'. *Review of Accounting and Finance*, Vol.15 No.4, pp. 445-462.
- Hidayanti, A. N., & Laksito, H. (2013). 'Pengaruh Antara Kepemilikan Keluarga dan Corporate Governance Terhadap Tindakan Pajak Agresif'. *Doctoral dissertation*, Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
- Hoseini, M., Safari Gerayli, M. and Valiyan, H. (2019), "Demographic characteristics of the board of directors' structure and tax avoidance: Evidence from Tehran Stock Exchange", *International Journal of Social Economics*, Vol. 46 No. 2, pp. 199-212.

- Jensen, M. & Meckling, W. (1976), 'Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure', *Journal of Financial Economics*, Vol. 3 No. 4, pp. 305-60.
- Lannis, R. & G. Richardson. (2011). 'The Effect of Board Director Composition on Corporate Tax Aggressiveness', *Journal of Accounting and Public Policy*. Vol.30, pp 50-70.
- Low, Angie. (2006). "Managerial Risk-Taking Behavior and Equity-Based Compensation". *Fisher College of Business Working Paper, 03-003*. Mills, L dan K. Newberry. 2001. The Influence of Tax and Nontax Costs on Book-Tax Reporting Differences. *The Journal of the American Taxation Association*, 23 (1). Pp. 1-19.
- Lukviarman, N. 2016. Corporate Governace: Menuju Penguatan Konseptual dan Implementasi di Indonesia. Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
- Maharani, I Gusti Ayu Cahya dan Ketut Alit Suardana. 2012. Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, dan Karakteristik Eksekutif pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur. *E- jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Meilinda, Maria, 2013. Pengaruh Corporate Governance terhadap Manajemen Pajak. Skripsi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang.
- Minnick, K & T. Noga. (2010). 'Do corporate governance characteristics influence tax management?'. *Journal of Corporate Finance*. Vol.16, pp. 703-718.
- Solomon, J. (2007). *Corporate Governance and Accountability*. United states: John Wiley & Sons.
- Zhou, Y. (2011), *Ownership Structure, Board Characteristics, And Tax Aggressiveness*. Hong Kong: University of Hong Kong.